



**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**DINAS KEHUTANAN**

**EVALUASI HASIL RENJA TRIWULAN I  
TAHUN 2019**

**PANGKALPINANG**

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Lampiran.....	iv
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sasaran, Program Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Kelompok Sasaran.....	4
<b>BAB II</b> <b>EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA</b>	
2.1 Perbandingan antara Program/Kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.....	
2.2 Capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan Renja Perangkat Daerah.....	
<b>BAB III</b> <b>KENDALA DAN SARAN TINDAK LANJUT.....</b>	
3.1 Kendala.....	29
<b>BAB IV</b> <b>PENUTUP.....</b>	
4.1 Kesimpulan.....	31
<b>LAMPIRAN.....</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Untuk melaksanakan pembangunan daerah diperlukan berbagai dokumen perencanaan yang terkait, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun, Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, serta Rencana Kerja (Renja) SKPD dokumen perencanaan SKPD untuk periode (1) satu tahun.

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, wajib memiliki dokumen perencanaan Renstra SKPD dan Renja SKPD. Proses penyusunan Renja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas, pertama persiapan penyusunan Renja SKPD, dengan agenda kerja pembentukan tim penyusunan Renja SKPD, orientasi mengenai Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, dan pengumpulan data dan informasi. Kedua penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi tahapan kegiatan perumusan rancangan Renja SKPD dan tahapan penyajian rancangan Renja SKPD.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/67.a/BAPPEDA/2017 tentang Pengesahan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019. Renja SKPD ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah.

Untuk mengetahui perkembangan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja diperlukan pengendalian dan evaluasi

terhadap dokumen Renja tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan evaluasi terhadap Hasil Renja Tahun 2018 Triwulan I.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam Evaluasi Renja Triwulan I Tahun 2018 Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022;
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunann Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2017 tentang Renstra Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022;
23. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/687.a/BAPPEDA/2017 tentang Pengesahan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Triwulan I, adalah:

1. Mendukung upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022;
2. Mewujudkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan tahun 2019.
3. Melakukan evaluasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan hasil perencanaan pembangunan dalam Renja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

### **1.4 Sasaran, Program Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Kelompok Sasaran**

Rumusan program dan kegiatan Dinas Kehutanan dalam Renja tahun 2018 disesuaikan dengan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 - 2022, Renja tersebut juga dirumuskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Beliiitung.

Jumlah program dan kegiatan dalam renja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 terdiri atas 4 (empat) program dengan 28 (Dua puluh delapan) kegiatan. Untuk melaksanakan Renja tahun 2019 jumlah pagu dana indikatif sebesar Rp. 11.063.643.150,- (Sebelas milyar enam puluh tiga juta enam

ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari Pagu sejumlah Rp. 7.650.958.650; ( Tujuh milyar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) berumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dan Pagu sejumlah Rp. 3.412.684.500; ( Tiga milyar empat ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Untuk program kegiatan tahun 2019 sudah terakomodir di dalam Renstra Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022, walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak masuk dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara keseluruhan Sasaran, Program Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Kelompok Sasaran Renja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dapat di lihat dalam tabel 1 (satu) Sasaran, Program Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Kelompok Sasaran Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

**Tabel 1**

Sasaran, Program Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Kelompok Sasaran Kinerja Renja OPD Tahun 2019  
Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Kelompok Sasaran	Ket
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung teknis kegiatan dinas	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Persentase peningkatan disiplin Aparatur	Pangkalpinang	100 %	4.678.298.000,00	PAD	Aparatur	
		1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	Pangkalpinang	100 %	3.493.930.000,00	PAD	Aparatur	
		2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan	Pangkalpinang	100 %	997.790.000,00	PAD	Aparatur	

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Kelompok Sasaran	Ket
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			kan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan						
		3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (25 Orang)	Pangkalpinang (6 Kabupaten)	100%	167.445.500,00	PAD	Aparatur	
		4. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka	Pangkalpinang	85 %	3.985.000,00	PAD	Aparatur	

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Kelompok Sasaran	Ket
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			menengah daerah diatas 85%						
		5. Penyusunan Sistem Database Kehutanan berbasis IT	Tersusunnya Database Kehutanan kedalam aplikasi	Pangkalpinang (Kabupaten Bangka Selatan)	1 Aplikasi	6.953.000,00	PAD	Aparatur	
		6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistennya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah	Pangkalpinang	85%	8.195.000,00	PAD	Aparatur	
<b>2</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan</b>	<b>Program Peningkatan</b>		<b>Provinsi Kepulauan</b>	<b>20 persenta</b>	<b>992.009.650,00</b>	PAD		

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Kelompok Sasaran	Ket
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>Potensi Sumber Daya Hutan di Prov. Kep. Bangka Belitung</b>	<b>Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan</b>		<b>n Bangka Belitung</b>	<b>se izin usaha hasil hutan kayu</b>				
		1. Pemanfaatan Kawasan Hutan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Pangkalpinang	8 Laporan	54.889.150,00	PAD	Pemegang Izin Usaha di Kawasan Hutan Negara dan Aparatur Kahutanan	
		2. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	Terlaksananya pengujian inokulan dan pengembangan teh dan kandungan pucuk serta daun tanaman Gaharu dan Pelawan	Pangkalpinang	2 Unit	226.471.500,00	PAD	Hutan tanaman dan Hutan Alam pada tanaman Gaharu dan Pelawan di Kabupaten Bangka Tengah dan Belitung	

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Kelompok Sasaran	Ket
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan	Jumlah dokumen pengelolaan Kawasan hutan	Pangkalpinang	8 Dokumen	97.825.000,00	PAD	Aparatur dan pihak terkait lainnya	
		4. Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu	Jumlah wasganis/ganis yang mendapatkan sertifikat ulang	Pangkalpinang	20 Orang	64.859.000,00	PAD	Aparatur Kehutanan, Pemilik Izin / Pelaku Usaha & pihak terkait	
		5. Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan	Terlaksananya keikutsertaan dalam Expo pengembangan dan Promosi Hasil Hutan	Samarinda	1 Kali	335.650.000,00	PAD	Aparatur dan Stakeholder	
		6. Pengadaan kendaraan roda dua (R2) UPTD KPH	Tersedianya alat-alat angkutan darat bermotor sepeda	3 Kabupaten	5 Unit	200.000.000,00	DAK	Aparatur	

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Kelompok Sasaran	Ket
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		(DAK)	motor UPTD KPH						
		7. Pembangunan sumber benih dan konservasi exsitu Gaharu dan Pelawan	Terbangunnya sumber benih dan konservasi exsitu Gaharu dan Pelawan	Prov. Bangka Belitung	20 Hektar	200.000.000,00	PAD	Aparatur dan Stakeholder	
		8. Pembangunan Kantor Resort KPH (DAK )	Terbangunnya kantor resort UPTD KPH	3 Kabupaten	2 Unit	987.684.000,00	DAK	Aparatur	
<b>3</b>	<b>Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan</b>	<b>Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA dan Ekosistem</b>			<b>20% persentasi Kawasan Ekosistem Essensial (KEE)</b>	<b>1.220.127.000,00</b>			
		1. Penertiban pelanggaran tindak pidana kehutanan	Berkurangnya tindak pidana kehutanan	6 Kabupaten	2 berkas perkara	23.500.000,00	PAD	Aparatur	

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Kelompok Sasaran	Ket
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Terlaksananya pengendalian kebakaran hutan dan lahan	6 Kabupaten	30%	212.932.000,00	PAD	Aparatur	
		3. Masyarakat mitra polisi kehutanan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyampaikan informasi kegiatan kehutanan di Daerah	Provinsi Kep. Babel	60 Orang	307.160.000,00	PAD	Aparatur	
		4. Penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan oleh polhut	Terlaksananya perlindungan dan pengamanan hutan oleh POLHUT	Provinsi Kep. Babel	90%	186.740.000,00	PAD	Aparatur dan stakeholder	
		5. Tenaga pendukung polisi hutan	Tersedianya tenaga pendukung	Provinsi Kep. Babel	15 Orang	458.980.000,00	PAD	Aparatur dan pemangku	

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Kelompok Sasaran	Ket
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			perlindungan hutan dan hasil hutan yang responsif Gender					kepentingan	
		6. Identifikasi dan inventarisasi kawasan ekosistem Essensial	Jumlah Kawasan Ekosistem Essensial yang terbentuk dan terjaga	Pulau Bangka dan P. Belitung	2 Kawasan	30.755.000,00	PAD	Aparatur dan pemangku kepentingan	
<b>4</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Tercapai kualitas bibit dan sumber benih yang berkualitas dan pengelolaan rehabilitasi yang tertata</b>		<b>1 dokumen dan 20 Ha</b>	<b>750.989.000,00</b>			
		1 Pembinaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Terrehabilitasi DAS yang kritis di Provinsi	6 Kabupaten	200 Ha	68.644.000,00	PAD	Pemegang IPPKH dan Masyarakat di DAS	

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Kelompok Sasaran	Ket
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Kepulauan Bangka Belitung						
		2. Pemenuhan kewajiban Rehabilitasi DAS bagi pemegang IPPKH	Terlaksananya pengawasan terhadap pemegang IPPKH se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pemenuhan kewajiban Rehabilitasi DAS	4 Kabupaten	6 Pemegang IPPKH	2.555.000,00	PAD	Pemegang IPPKH	
		3. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan lahan	Terlaksananya pengembangan kualitas perbenihan tanaman hutan dan rencana pengelolaan RHL	Provinsi dan 6 kabupaten	1 dokumen dan 20 Ha	82.830.000,00	PAD	3 lokasi sumber benih diProvinsi Kepulauan Bangka Belitung dan penangkar serta	

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Kelompok Sasaran	Ket
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								dokumen rehabilitasi hutan dan lahan	
		4. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan kelestarian hutan	Pusat, luar daerah dan 6 Kabupaten	33 Orang dan 1 kali	158.492.000,00	PAD	Penyuluh kehutanan dan 7 kategori peserta lomba wana lestari	
		5. Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan di dalam kawasan dan luar kawasan hutan dan aksi puncak penanaman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi dan 6 kabupaten	80 Hektar	165.906.000,00	PAD	Lahan kritis di Kabupaten /Kota se-Provinsi Bangka Belitung dan IPPKH atas nam Gubernur Kepulauan Bnagka Belitung	

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Kelompok Sasaran	Ket
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		6. Pengembangan perhutanan sosial	Terlaksananya peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Perhutanan Sosial yang responsif Gender	Provinsi dan 6 kabupaten	6 KTH, 5HTR, 5HKm, 3 HD dan 1 Pokja	272.562.000,00	PAD	Penyuluh kehutanan, KTH Perhutanan sosial (HTR, HKm, HD dan Pemberdayaan masyarakat) dan pokja PPS	
		7. Pengembangan sarana dan prasarana Usaha Ekonomi produktif (DAK)	Tersedianya sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif	6 Kabupaten	2 Unit	272.562.000,00	DAK	Aparatur dan stakeholder	
<b>5</b>	<b>Peningkatan pelayanan tata kelola hutan</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan</b>			<b>50 Persentase Pengelolaan Kawasan Hutan oleh UPTD KPH</b>	<b>9.535.000,00</b>			

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Kelompok Sasaran	Ket
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		1. Penyelesaian Usulan Perubahan Status Kawasan Hutan/Tora	Persentase pengelolaan hutan oleh UPTD KPH	Prov. Kep. Bangka Belitung	50 %	9.535.000,00	PAD	Aparatur dan Pemangku Kepentingan	
<b>TOTAL</b>						<b>11.063.643.150,00</b>			

## BAB II

# EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TAHUN 2018 TRIWULAN I

### 2.1 Perbandingan Antara Program/Kegiatan dalam Renja Tahun 2018 Terhadap Program/Kegiatan dalam Renstra

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 7 "*renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif*", mengamanatkan SKPD untuk memiliki Renstra SKPD, yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Setelah Renstra SKPD ditetapkan, untuk melaksanakan program kegiatan setiap tahun, maka ditetapkan Rencana Kerja (Renja) SKPD, yaitu dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu kepada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 – 2022.

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2018 melaksanakan 5 (lima) program dengan 36 (tiga puluh enam) kegiatan. Kelima program kegiatan tersebut adalah : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran, 2. program peningkatan tata kelola dan pemanfaatan kawasan hutan, 3. program peningkatan perlindungan dan konservasi SDA dan Ekosistem, 4. program peningkatan pengelolaan DAS dan pemberdayaan masyarakat, 5. program peningkatan pelayanan teknis tata kelola kehutanan. Pada program administrasi perkantoran, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 6 (enam) kegiatan, terdiri dari kegiatan pelayanan administrasi perkantoran; kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur; kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan; kegiatan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; kegiatan penyusunan sistem database kehutanan berbasis IT.

Pada program peningkatan tata kelola dan pemanfaatan kawasan hutan melaksanakan 6 (enam) kegiatan, terdiri dari kegiatan pemanfaatan kawasan hutan; kegiatan pengembangan hasil hutan bukan kayu; kegiatan penyusunan rencana pengelolaan kawasan hutan; kegiatan peningkatan usaha hasil hutan kayu; kegiatan expo pengembangan dan promosi hasil hutan; kegiatan Pembangunan sumber benih dan konservasi exsitu Gaharu dan Pelawan.

Pada Program Peningkatan Perlindungan dan konservasi SDA dan ekosistem ada 6 (enam) kegiatan, yaitu kegiatan penerbitan pelanggaran tindak pidana kehutanan; kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; kegiatan masyarakat mitra polisi kehutanan; kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan dan POLHUT; kegiatan tenaga pendukung polisi hutan; kegiatan indentifikasi dan inventarisasi kawasan ekosistem essensial.

Pada program peningkatan pengelolaan DAS dan pemberdayaan masyarakat ada 6 (enam) kegiatan, yaitu: kegiatan Pembinaan pengelolaan daerah aliran sungai; kegiatan pemenuhan kewajiban rehabilitasi hutan dan pemegang IPPKH; kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan; kegiatan penyelenggaraan penyuluh kehutanan; kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; kegiatan pengembangan perhutanan sosial.

Program peningkatan pelayanan teknis tata kelola kehutanan terdapat 1(satu) kegiatan, yaitu kegiatan penyelesaian usulan perubahan status perubahan kawasan hutan/TORA.

Program dan kegiatan yang direncanakan pada Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 sesuai dengan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022, namun ada beberapa kegiatan yang tidak ada dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017– 2022 yang merupakan penambahan kegiatan baru sesuai arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan hasil penyesuaian kebutuhan pelaksanaan fungsi urusan kehutanan, antara lain : koordinasi dan konsolidasi ke dalam daerah dan kegiatan rutin lainnya.

Target dan realisasi (kinerja dan keuangan) Triwulan I yang terdapat dalam Renja Dinas Kehutanan Tahun 2019 hampir semuanya mengacu kepada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022, namun ada beberapa kegiatan yang target dan realisasi keuangannya tidak sesuai dengan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 disebabkan adanya penyesuaian dengan keadaan kemampuan keuangan Daerah.

Untuk gambaran perbandingan kesesuaian antara program/kegiatan yang tercantum dalam Renja dengan Renstra, dapat dilihat pada tabel 2 (dua) berikut ini :

Tabel 2

Perbandingan Kesesuaian Program/Kegiatan  
Antara Renja Tahun 2019 dengan Renstra 2017–2022

OPD: Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Renja 2019		Renstra 2017 - 2022		Keterangan
	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6
1	<b>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</b>		<b>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</b>		Sesuai
		1. Pelayanan Administrasi Perkantoran		1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sesuai
		2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sesuai
		3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sesuai
		4. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan		4. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Sesuai
		5. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		5. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Sesuai
		6. Penyusunan Sistem Database Kehutanan Berbasis IT		6. Penyusunan Sistem Database Kehutanan Berbasis IT	Sesuai
2	<b>Program peningkatan tata kelola dan pemanfaatan kawasan</b>		<b>Program peningkatan tata kelola dan pemanfaatan kawasan</b>		<b>Sesuai</b>

No	Renja 2019		Renstra 2017 - 2022		Keterangan
	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
	<b>hutan</b>		<b>hutan</b>		
		1. Pemanfaatan Kawasan Hutan		1. Pemanfaatan Kawasan Hutan	Sesuai
		2. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu		2. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	Sesuai
		3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan		3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan	Sesuai
		4. Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu		4. Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu	Sesuai
		5. Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Balikpapan Hutan		5. Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Balikpapan Hutan	Sesuai
		6. Pembangunan sumber benih dan konservasi exsitu Gaharu dan Pelawan		6. Pembangunan sumber benih dan konservasi exsitu Gaharu dan Pelawan	Sesuai
<b>3</b>	<b>Program peningkatan perlindungan dan konservasi SDA dan Ekosistem</b>		<b>Program peningkatan perlindungan dan konservasi SDA dan Ekosistem</b>		<b>Sesuai</b>
		1. Penertiban Pelanggaran Tindak Pindana		1. Penertiban Pelanggaran Tindak Pindana	Sesuai

No	Renja 2019		Renstra 2017 - 2022		Keterangan
	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
		Kehutanan		Kehutanan	
		2. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan		2. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Sesuai
		3. Masyarakat mitra polisi kehutanan		3. Masyarakat mitra polisi kehutanan	Sesuai
		4. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan oleh POLHUT		4. Penyelenggara an Perlindungan dan Pengamanan Hutan oleh POLHUT	Sesuai
		5. Tenaga Pendukung Polisi Hutan		5. Tenaga Pendukung Polisi Hutan	Sesuai
		6. Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Essensial		6. Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Essensial	Sesuai
<b>4.</b>	<b>Program peningkatan pengelolaan DAS dan pemberdayaan masyarakat</b>		<b>Program peningkatan pengelolaan DAS dan pemberdayaan an masyarakat</b>		<b>Sesuai</b>
		1. Pembinaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		1. Pembinaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Sesuai
		2. Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi 4		2. Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi 4	Sesuai

No	Renja 2019		Renstra 2017 - 2022		Keterangan
	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
		Kabupaten Pemegang IPPKH		Kabupaten Pemegang IPPKH	
		3. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan		3. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Sesuai
		4. Penyelenggara Penyuluhan Kehutanan		4. Penyelenggara Penyuluhan Kehutanan	Sesuai
		5. Rehabilitasi Hutan dan Lahan		5. Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Sesuai
		6. Pengembangan Perhutanan Sosial		6. Pengembangan Perhutanan Sosial	Sesuai
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan pelayanan teknis tata kelola kehutanan</b>		<b>Program Peningkatan pelayanan teknis tata kelola kehutanan</b>		<b>Sesuai</b>
		1. Penyelesaian Usulan Perubahan Status kawasan hutan/TORA		1. Penyelesaian Usulan Perubahan Status kawasan hutan/TORA	-

**Tabel 3**

Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan Renja  
Triwulan I Tahun 2018

**OPD: Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

No	Renja 2019			Keuangan		
	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Indikator Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Perse n (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</b>	<b>100 %</b>	<b>Persentase peningkatan disiplin Aparatur</b>			
	Kegiatan :					
	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	3.493.930.000,00	0	0
	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	997.790.000,00	0	0
	3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (25 Orang)	167.445.500,00	0	0
	4. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	85 %	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target di atas 90%	3.985.000,00	0	0

No	Renja 2019			Keuangan		
	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Indikator Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Perse n (%)
1	2	3	4	5	6	7
	5. Penyusunan Sistem Database Kehutanan Berbasis IT	1 Aplikasi		6.593.000,00	0	
	6. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	85%	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistennya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah diatas 85 %	8.195.000,00	0	
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan</b>	<b>5 persentase izin usaha hasil hutan kayu</b>	<b>Persentase (%)</b>			
	Kegiatan :					
	1. Pemanfaatan Kawasan Hutan	95%	Jumlah Dokumen Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	54.889.150,00	0	
	2. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	2 Unit	Terlaksananya pengujian inokulan dan pengembangan teh dan kandungan pucuk serta daun tanaman Gaharu dan Pelawan	226.471.500,00	0	
	3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan	8 Dokumen	Jumlah dokumen pengelolaan Kawasan hutan	97.825.000,00	0	

No	Renja 2019			Keuangan		
	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Indikator Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Perse n (%)
1	2	3	4	5	6	7
	4. Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu	20 Orang	Jumlah wasganis/ganis yang mendapatkan sertifikat ulang	64.859.000,00	0	
	5. Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan	1 Kali	Terlaksananya keikutsertaandalam Expo pengembangan dan Promosi Hasil Hutan	335.650.000,00	0	
	6. Pengadaan Kendaraan roda dua (R-2) UPTD KPH (DAK Kehutanan)	2 unit	Tersedianya alat- alat angkutan darat bermotor sepeda motor UPTD KPH	200.000.000,00	0	
	7. Pembangunan sumber benih dan konservasi exsitu Gaharu dan Pelawan	20 Hektar	Terbangunnya sumber benih dan konservasi exsitu Gaharu dan Pelawan	212.315.000,00	0	
	8. Pembangunan Kantor Resort KPH (DAK)	5 unit	Terbangunnya kantor resort UPTD KPH	987.684.000,00	0	
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA Dan Ekosistem</b>	<b>20% persentasi Kawasan Ekosisten Essensial (KEE)</b>	<b>Persentase (%)</b>			
	Kegiatan :					
	1. Penertiban Pelanggaran Tindak Pindan Kehutanan	2 berkas perkara	Berkurangnya tindak pidana kehutanan	23.560.000,00	0	
	2. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	30%	Terlaksananya pengendalian kebakaran hutan dan lahan	212.932.000,00	0	
	3. Masyarakat Mitra Polisi	Provinsi	Meningkatnya peran serta	307.160.000,00	0	

No	Renja 2019			Keuangan		
	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Indikator Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Perse n (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Kehutanan	Kepulauan Bangka Belitung	masyarakat dalam menyampaikan informasi kegiatan kehutanan di Daerah			
	4. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan oleh POLHUT	90%	Terlaksananya perlindungan dan pengamanan hutan oleh POLHUT	186.740.000,00	0	0,00 %
	5. Tenaga Pendukung Polisi Hutan	15 Orang	Tersedianya tenaga pendukung perlindungan hutan dan hasil hutan yang responsif Gender	458.980.000,00	0	
	6. Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Essensial	2 Kawasan	Jumlah Kawasan Ekosistem Essensial yang terbentuk dan terjaga	30.755.000,00	0	
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>1 dokumen dan 20 Ha</b>	<b>Tercapai kualitas bibit dan sumber benih yang berkualitas dan pengelolaan rehabilitasi yang tertata</b>			
	Kegiatan :					
	1. Pembinaan Pegelolaan Daerah Aliran Sungai	200 Ha	Terrehabilitasi DAS yang kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	68.644.000,00	0	
	2. Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH	6 Pemegang IPPKH	Terlaksananya pengawasan terhadap pemegang IPPKH se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam	2.555.000,00	0	

No	Renja 2019			Keuangan		
	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Indikator Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Perse n (%)
1	2	3	4	5	6	7
			rangka pemenuhan kewajiban Rehabilitasi DAS			
	3. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1 dokumen dan 20 Ha	Terlaksananya pengembangan kualitas perbenihan tanaman hutan dan rencana pengelolaan RHL	82.830.000,00	0	
	4. Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	33 Orang dan 1 kali	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan kelestarian hutan	158.492.000,00	0	
	5. Rehabilitasi Hutan dan Lahan	80 Hektar	Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan di dalam kawasan dan luar kawasan hutan dan aksi puncak penanaman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	165.906.000,00	0	
	6. Pengembangan Perhutanan Sosial	6 KTH,5HTR,5 HKm,3 HD dan 1 Pokja	Terlaksananya peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Perhutanan Sosial yan responsif Gender	272.562.000,00	0	
	7. Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif (DAK)	2 unit	Tersedianya sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif	2.225.000.000,00	0	
<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan</b>	<b>50 Persentase Pengelolaan Kawasan Hutan oleh</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>9.535.000,00</b>		

No	Renja 2019			Keuangan		
	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Indikator Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Perse n (%)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>UPTD KPH</b>				
	Kegiatan :					
	1. Penyelesaian Usulan Perubahan Status kawasan hutan/TORA	50%	Penyelesaian Usulan Perubahan Status kawasan hutan/TORA	9.535.000,00	0	
			<b>Total</b>	<b>11.063.643.000,00</b>		

Jumlah keseluruhan pagu anggaran Tahun 2019 untuk Belanja Langsung sebesar Rp.11.063.643.150,00,- (Sebelas milyar enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) rupiah). Pada Triwulan I Tahun 2019, untuk realisasi fisik kegiatan telah mencapai 0,16 % dan untuk realisasi anggaran/keuangan terealisasi pada triwulan II Tahun 2019.

# BAB III

## KENDALA DAN SARAN TINDAK LANJUT

---

### 3.1 Kendala

Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2019 pada Triwulan I belum dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Beberapa kendala dan permasalahan teknis Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja, antara lain :

- a. Untuk kegiatan pada bulan Maret 2019 atau triwulan I secara fisik telah terealisasi atau dilaksanakan, namun untuk realisasi keuangan akan terealisasi pada triwulan II Tahun 2019.
- b. Rencana Anggaran Kas yang baru dimulai btriwulan II Tahun Anggaran 2019.
  - a. Kapasitas kelembagaan Kehutanan yang masih terbatas (kualitas dan kuantitas), baik SDM , sarana penunjang maupun tatanan sistem;
  - b. Belum semua kawasan hutan dikelola dalam unit-unit pengelolaan;
  - c. Pengembangan investasi dibidang Kehutanan terhambat pada kondisi yang kurang kondusif (semisal ada pengakuan atas kawasan hutan oleh masyarakat);
  - d. Luas kawasan hutan (kritis dan sangat kritis mencapai 20.688 hektar (1,2%), namun kriteria agak kritis (392.437 hektar) dan potensial kritis (794.718 hektar), berdasarkan review lahan kritis Tahun 2018 oleh BPDAS Baturusa Cerucuk, perlu dilaksanakan perlindungan dan upaya Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
  - e. Personil pengamanan dan perlindungan hutan (Polhut, PPNS, Penyuluh) beserta sarpras penunjang masih belum mencukupi rasio yang sesuai, menyebabkan tingginya gangguan keamanan terhadap kawasan hutan dan hasil-hasil hutan;

### **3.2 Saran Tindak Lanjut**

Untuk bisa mencapai target dan realisasi kinerja dan anggaran/keuangan secara maksimal maka perlu diadakan beberapa hal, antara lain :

1. Perlunya penempatan pegawai pada Dinas Kehutanan dengan sesuai kompetensi dan keahlian pegawai yang bersangkutan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat lebih maksimal dan pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan maksimal;
2. Perlunya pembangunan sarana dan prasarana aparatur yang lengkap dan mendukung, terutama Gedung Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Peningkatan koordinasi antara Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta stake holder terkait, untuk kerjasama menyelesaikan permasalahan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan hasil hutan;
4. Meningkatkan kinerja bagi pelaksana kegiatan sesuai dengan target capaian yang ditentukan dan memberikan dampak positif bagi pembangunan;

# BAB IV

## KESIMPULAN

---

Setelah dilaksanakan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Triwulan I, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, disusun untuk mendukung mewujudkan visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan visi dan misi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja 2019 untuk pagu Belanja Langsung sebesar Rp.11.063.643.150,00 (Sebelas milyar enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) rupiah). Sampai dengan Triwulan I untuk pelaksanaan kegiatan secara fisik telah dilaksanakan sebesar 0,16 %, untuk realisasi anggaran/keuangan baru dilaksanakan pada triwulan II. Demikian Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 Triwulan I Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, semoga dapat menjadi bahan tindak lanjut. Terimakasih.

Pangkalpinang, April 2019

Kepala Dinas Kehutanan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

H. MARWAN, S. Ag.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700814 199203 1 002

## KATA PENGANTAR

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kewenangan Dinas Kehutanan diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, wajib memiliki dokumen perencanaan Renstra SKPD. Proses penyusunan Renja SKPD Dinas Kehutanan provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas, pertama persiapan penyusunan Renja SKPD, dengan agenda kerja pembentukan tim penyusunan Renja SKPD, orientasi mengenai Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, dan pengumpulan data dan informasi. Kedua penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi tahapan kegiatan perumusan rancangan Renja SKPD dan tahapan penyajian rancangan Renja SKPD.

Untuk mengetahui perkembangan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja diperlukan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen Renja tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.

**KEPALA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**H.MARWAN,S.Ag**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700814 199203 1 002